

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi dimana pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Semua proses pembuatan kebijakan politik yang menyangkut kepentingan rakyat harus didasari pada kedaulatan rakyat. Di Indonesia pemilihan gubernur merupakan suatu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilihan gubernur diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, dan pemilihan gubernur. Pemilihan Umum merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan pemilu merupakan kehendak bangsa Indonesia untuk mengkokohkan dirinya sebagai negara demokratis, dan penyelenggaraan pemilu untuk memilih calon gubernur Sumatera Utara bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya, dan merupakan suatu syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

“Menurut Budiardjo (2008 : 461) dikebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebiasaan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat”.

Pemilihan gubernur merupakan suatu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilihan gubernur diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Negara yang menganut paham demokrasi, bentuk partisipasi politik masyarakat yang paling mudah diukur adalah ketika pemilihan umum berlangsung. Perilaku warga negara yang dapat dihitung intensitasnya adalah melalui perhitungan persentase orang yang memiliki hak pilihnya (*voter turnout*) dibanding dengan warga negara yang memiliki hak pilih secara keseluruhan. Negara yang telah stabil dalam kehidupan berdemokrasi, biasanya tingkat partisipasi politik warganya sangat stabil, tidak fluktuatif. Oleh karena itu, semakin rendah tingkat partisipasi menjadi pertanda yang tidak baik bagi perkembangan iklim demokrasi di Indonesia, sebab jika angka ketidakikutsertaan masyarakat semakin bertambah maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 menjelaskan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukannya, masyarakat bangsa dan negara”. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam membantu perkembangan pendidikan di Indonesia dan membantu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Di dalam pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jelas dikatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Namun itu tidaklah cukup, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat.

Peran pendidikan dalam kemajuan suatu bangsa dan masyarakat merupakan hal sangat penting. Dimana pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus selalu ditingkatkan dan dijaga mutunya, jika pendidikan rendah, maka akan berdampak pada ketidaktepatan investasi pendidikan, bahkan dapat menimbulkan masalah sosial baru kedepannya. Oleh karena itu, pendidikan yang tinggi sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui perilaku memilih, dimana perilaku memilih sangat diperlukan dalam setiap pemilihan Gubernur yang merupakan fokus utama dalam partisipasi suatu pemilu. Perilaku memilih merupakan suatu tindakan yang terlibat secara langsung aktif dalam memberikan hak suaranya dalam pemilu baik individu atau kelompok tertentu.

Dari hasil pengamatan awal, Desa Korajim merupakan salah satu desa kecil yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai, dimana Desa Korajim terbagi menjadi lima dusun dari Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV dan Dusun V. Desa Korajim merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan rata-rata bersuku Jawa dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Laki-laki 406 jiwa dan perempuan 411 jiwa, berdasarkan data monografi masyarakat mayoritas memiliki lulusan pendidikan yang berbeda-beda mulai tingkat SD, SMP, SMA

hingga Perguruan Tinggi bahkan ada yang tidak mengenyam pendidikan, dan memiliki pekerjaan umumnya seperti Tani dan Buruh Harian Lepas (BHL).

Masyarakat Desa Korajim telah mengikuti pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Sumatera Utara periode 2018-2023 diselenggarakan secara serentak dengan jumlah keseluruhan 2 calon kandidat, dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 melibatkan seluruh warga masyarakat Desa Korajim yang terdaftar sebagai pemilih tetap untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur tersebut.

Jika dilihat dari hasil rekapitulasi pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, jumlah Daftar Pemilihan Tetap (DPT) di Desa Korajim sebanyak 817 orang yang menggunakan hak pilihnya. Banyak masyarakat di Desa Korajim yang aktif menggunakan hak suaranya dan hadir untuk melakukan kewajibannya dari pada yang tidak ikut melakukan hak pilihnya atau Golongan Putih (Golput).

Tingkat pendidikan masyarakat sesuai Daftar Pemilihan Tetap (DPT) di Desa Korajim berbeda-beda tingkat pendidikannya mulai dari tingkat SD 364 orang sekitar 44,55%, SMP 223 orang sekitar 27,29%, SMA 211 orang sekitar 25,82%, sampai perguruan tinggi D3 2 orang sekitar 0,24%, dan S1 17 orang sekitar 2,08%. (Sumber : KPU Kabupaten Serdang Bedagai)

Pengamatan awal bahwa pertimbangan-pertimbangan pemilih lakukan dalam memilih calon Gubernur Sumatera Utara periode Tahun 2018-2023 di Desa Korajim masyarakat memberikan hak suaranya berdasarkan beberapa landasan.

Dapat dilihat dari aspek visi dan misi kandidat dimana masyarakat mengedepankan hal-hal apa yang menjadi program kandidat apabila terpilih

kelak. Selanjutnya dari aspek agama yang dianut kandidat. Dimana masyarakat memberikan hak suaranya dengan memperhatikan bagaimana kehidupan religius para kandidat apakah mendukung dalam hal pemerintahan yang akan diemban nanti. Yang terakhir dapat dilihat dari aspek kekerabatan dimana masyarakat memandang sistem kedekatan dengan para kandidat, yang artinya dapat memberikan peluang sebagai pendengar dan pelaksana aspirasi masyarakat apabila memiliki hubungan kekerabatan diantaranya. Adapun partai yang terkait dari kesamaan pandangan responden dengan anggota keluarganya terhadap pilihan tertentu serta adanya kesamaan antara partai yang dipilih dengan partai yang dikagumi.

Melihat Desa Korajim merupakan Desa dengan tingkat partisipasi yang tinggi di Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Pemilih Gubernur Sumatera Utara Periode Tahun 2018-2023 (Studi Kasus Masyarakat Desa Korajim Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai)”.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :“Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Pemilih Gubernur Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Masyarakat Desa Korajim Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai)”.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Pemilih Gubernur Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Masyarakat Desa Korajim Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai)?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Pemilih Gubernur Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Masyarakat Desa Korajim Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai).

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Konseptual
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep, teori dan kelimuan pendidikan kewarganegaraan khususnya yang terkait dengan perilaku dalam pemilihan umum.
 - b. Sebagai pengembangan wawasan dan penguasaan kognitif serta memberikan informasi empirik mengenai keberhasilan hasil belajar dalam tingkat pendidikan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Program Studi, Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi khususnya tentang Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Pemilihan Gubernur Sumatera Utara.
- b. Bagi penyelenggara program temuan ini dapat dijadikan umpan balik untuk pengembangan lebih lanjut berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- c. Bagi diri penulis sangat bermanfaat sebagai pengalaman praktis dalam mengaplikasikan cara berfikir sistematis dan realistik yang dituangkan dalam tulisan.
- d. Bagi pihak lain sebagai bahan kajian untuk meneliti lebih jauh permasalahan yang berhubungan dengan Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Pemilih Gubernur Sumatera Utara.